

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes Terhadap Transformasi Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Eks PNPM Menjadi Bumdesma (di Kecamatan Ngasem). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu program yang didanai oleh alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan lain-lain. Salah satu contoh kepanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan dana bergulir yang berada dibawah program PNPM adalah kegiatan pimpan pinjam perempuan. Setelah diperbaruinya peraturan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2021, PNPM harus segera diganti menjadi Bumdesma. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari UPK PNPM kecamatan ngasem dan data sekunder didapatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021, Permendes Nomor 15 Tahun 2021 dan Permendes Nomor 3 Tahun 2021 serta data tersier yang didapatkan dari kamus hukum, internet, dan ensiklopedia. Hasil penelitian ini adalah Kecamatan ngasem belum menjalani transformasi dengan maksimal dan masih menjalani proses transformasi dari PNPM menjadi Bumdesma. PNPM kecamatan ngasem juga masih menggunakan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dikombinasikan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dikarenakan belum mencakupi semua syarat pengajuan serta pemberlakuan badan hukum.

Kata kunci: PNPM, BUM Desa Bersama, Dana Bergulir

ABSTRACT

This research examines the Implementation of Article 73 of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Bumdes regarding the Transformation of the Management of Ex-PNPM Revolving Fund Activities into Bumdesma (in Ngasem District). The National Program for Community Empowerment is one of the programs funded by the allocation of the state revenue and expenditure budget (APBN), the allocation of regional revenue and expenditure budgets (APBD), and others. One example of the extension of the government's hand in managing revolving funds under the PNPM program is women's lending and borrowing activities. After the updating of the regulations regarding Village Owned Enterprises in the 2021 Government Regulation, PNPM must immediately be changed to Bumdesma. The research conducted by the author is included in the type of empirical legal research. The type of data used in this research is primary data obtained directly from UPK PNPM Ngasem sub-district and secondary data obtained from Government Regulation Number 11 of 2021, Permendes Number 15 of 2021 and Permendes Number 3 of 2021 as well as tertiary data obtained from legal dictionaries, the internet, and encyclopedias. The results of this study are that Ngasem Sub-District has not undergone transformation to the fullest and is still undergoing the transformation process from PNPM to Bumdesma. The PNPM of the Ngasem sub-district also still uses the Operational Technical Guidelines (PTO) for the National Independent Community Empowerment Program combined with Law Number 6 of 2014 because they do not cover all the requirements for filing and enforcing legal entities.

Keywords: PNPM, Bumdesma, Revolving Fund